

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, tt.
- Ateng Syfrudin, *Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya*, Mandar Maju, tt.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Jogjakarta, 2001.
- Budiman Rusli, *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*, Hakim Publishing, Cimahi, 2013.
- Darji Darmodiharjo, *Santiaji Pancasila*, Usaha Nasional, Surabaya, 1991.
- Elli Ruslina, *Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD NEGARA Tahun 1945*, Total Media, Yogyakarta, 2013.
- H. M. Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta, 2013.
- Hambali, *Ilmu Administrasi Birokrasi Publik*, Yayasan Kodama, Yogyakarta, 2015.
- Harbani Pasalong, *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung, 2011.
- Himsar Silaban, *Permasalahan dalam Administrasi Publik*, Semesta Ilmu, Yogyakarta, 2014.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 1991.
- \_\_\_\_\_, *Mekanisme Pengontrolan Dalam Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah*, Bina Aksara Jakarta, 1996.
- Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Lili Rasjidi dan Ira Tania Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1980.

- Mokhammad Najih dan Solimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2012.
- Nicholas Henry, *Public Administration and Public Affairs* (diterjemahkan oleh Luciana D. Lontoh), Rajawali, Jakarta, 1995.
- Otje Salman S dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Menyimpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Paulus Efendi Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994.
- Philipus Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjahmada Press, Yogyakarta, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Discetionari Power dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Sinar Grafika, Jakarta, tt.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993.
- Prayudi Atmosudirdjo, *Ilmu Administrasi*, Untag University, Jakarta, 1970.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013.
- Roni Haniitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1985.
- \_\_\_\_\_, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1958.
- Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Univeritas Indonesia Press, Jakarta, Cetakan-III, 1986.
- Sudarsono & Edilius, *Koperasi dalam teori dan praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Syafiie dan Inu Kecana, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Bumi Aksara , Bandung, 1999.
- Turner, Mark and Hulme, *Governance, Administration and Development : Makiing the State Work*, MacMillan Press, London, 1997
- W.F. Prins & Kosim Adisoeputra. *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1982.
- Waldo, Dwight, ed, *Ideas and Issues in Public Administration*, Mc Graw-Hill Book Company Inc, New York, 1953.
- Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenanhan*, Grasindo, Jakarta, 2009.

Yeremias. T. Keban. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, Teori Dan Isu*, Gaya Media, Yogyakarta, 2008.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Jenis dan entuk Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peta Zonasi.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 tahun 2015 Tentang Kepariwisata

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 133 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 281 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Petunjuk Teknis Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, 2016.

## **C. Sumber lainnya**

Akhmad Mahrus, *Kedudukan Diskresi Pejabat Pemerintahan dan Kewenangan pada Umumnya*, [http://www.djppr.kemenkeu.go.id/uploads/files/Kajian\\_Artikel\\_DJPPR/Diskresi%20Pejabat%20PemerintahanAkhmad%20Mahrus.pdf](http://www.djppr.kemenkeu.go.id/uploads/files/Kajian_Artikel_DJPPR/Diskresi%20Pejabat%20PemerintahanAkhmad%20Mahrus.pdf) diunduh pada 23 Februari 2018.

- Andi Annisa Tiara Marina, *Tinjauan Yuridis Tentang Prosedur dan Pelaksanaan Izin Usaha Hotel di Kota Makassar*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2016.
- Bhenyamin Hoessein, 2002, "Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah," *Jurnal Bisnis dan Birokrasi*, No. 1/Vol.1/ Juli/2000.
- Bhenyamin Hoessein, 2002, "Kebijakan Desentralisasi", *Jurnal Administrasi Negara* Vol. II. No.02. Maret. 2002.
- Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, <http://kbbi.web.id/> eksistensi, diakses pada Minggu 18 September 2016.
- <http://bkbh.ums.ac.id/2017/12/analisis-prosedur-penutupan-hotel-alexis.html>, diunduh pada 12 Februari 2018.
- Kertajati, *Tentang kepariwisataan*, <http://www.sanitasi.net/Undang-Undang-no-10-tahun-2009-tentang-kepariwisataan.html>, diunduh pada Sabtu 19 November 2017, pukul 03.33 Wib.
- Rondinelly dalam Edward Mugabi, *Decentralization for Good Governance: Policies, Legal Frameworks and Implementation Strategies*, dalam Guido Bertucci, Riccardo Nencini, and Enrico Cecchetti; *Decentralized Governance for Democracy, Peace, Development and Effective Service Delivery*, (Region of Tuscany Regional Assembly, Italian Presidency, and United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2004),p. 22. Dikutip dari Rozan Anwar, *Pengembangan Model Administrasi Publik*, Fisip UI, 2009.
- S.Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia, Jakarta, 1994, hlm. 84. dalam Andi Annisa Tiara Marina, *Tinjauan Yuridis Tentang Prosedur dan Pelaksanaan Izin Hotel di Makassar*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, Makassar, 2016.
- Sri Pudyatmiko Y. Perizinan, *Problem dan Upaya Pembinaan*. Grafindo. Jakarta. 2009, hlm. 25. dalam Andi Annisa Tiara Marina, *Tinjauan Yuridis Tentang Prosedur dan Pelaksanaan Izin Hotel di Makassar*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, Makassar, 2016.
- Stephen P. Rob-bins, *Organization Theory: Structure Designs and Applications*, 3<sup>rd</sup> edition, Prentice Hall, New Jersey, 1990. dalam Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Wawancara dengan Pak Budya Seksi Pengembangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta, 6 Maret 2018.